

Lampiran 20: Framework Matrix Wawancara tentang Proses Kombinasi Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel di Kabupaten Kulon Progo

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|-------------------|--|---|---|--------------------------------------|
| 5 : Alif Romdhoni | | <p>Alif Romdhoni Iya.. jadikan kita setiap melalui mekanisme apel dan jam pimpinan jadi kan kita tiap senin sampe Kamis apel pagi jelas, kemudian ada setiap bulan sekali rapat struktural, nah.. di rapat struktural itu pimpinan pasti menegaskan baik secara kegiatan maupun tanggung jawab di masing-masing lingkup tugas di PPTK, eslom 4 dan eslom 3 di bawahnya untuk memantau bagaimana progres terutama yang sedang in.. pada saat itu. Misalnya kita rapat pada bulan Februari, Maret, pada bulan Maret misalnya, yang sedang in kan Maret itu kan PBB penyampaian pajak berjalan, nah.. biasanya pimpinan bagaimana progresnya untuk PBB berjalan kita, nanti digabungkan bagaimana secara realisasinya target-target untuk Kecamatan seperti apa, nah.. itu yang dilakukan pimpinan. Tapi e.. ketika akan nanti turun dari kan level terendahnya nanti kan sampe staf ya, sampe staf jadikan pimpinan kan hanya ke secara struktural nah nanti dari struktural kan.. ada istilahnya apa ya.. transfer lagi ke.. ke temen-temen di.. ke jajarannya yang punya staf untuk mekanismenya</p> <p>Alif Romdhoni Ya.. kita kan kadang yang dikirim itukan mungkin tahun yang A yang katakanlah, tahun kemaren si B katakanlah, ya.. si A dan si B ini ketika anu ya.. nanti menjadi leader ketika harus memberikan pencerahan ketika kemudian ada pertanyaa, ketika ada hal yang kemudian masih belum jelas ya.. referensinya dari si A dan si B, termasuk misalnya BPHTB, BPHTB itu kan kebetulan hak tanah dan bangunan, biasanya temen-temen itu sering kali ah.. ini ini.. saksi bisu sebenarnya, ketika ada seseorang datang ada transaksi intinya ingin keringanan karena mungkin nggak dapet jalan nek sekian itu terlalu</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>mahallah dari harga pasar lah. Nah.. temen-temen yang pernah didiklatkan penilai properti itu yang nanti akan berbicara, bisa ya bisa tidak. Jadi bisa dikabulkan bisa tidak, kembali ke... nanti bagaimana itu kondisi riil di lapangan bahkan ada sampe kunjungan lapangan untuk memastikan bener po yang disampaikan itu seperti itu. Karena kan untuk menentukan kan juga dilihat dari lingkungan juga, jangan sampe nanti dia mengajukan keringanan katakanlah 10 juta padahal lingkungan sekitar dia kemaren payune sampe 100 juta seperti itu, jadi temen-temen yang penilai-penilai kita kan punya penilai properti itu yang akan memberikan penjelasan-penjelasan itu yang langsung kepada masyarakat ya.. jadi ini tuh tempat konsultasi bagi masyarakat yang ingin yang.. merasa keberatan dengan BHPBB yang 3% dan 2%</p> <p>Alif Romdhoni Ya.. yang jelas langsung alhamdulillah kita secara regulasi kita tidak ada yang menabrak aturan ya, kan kadang di-class action ya.. sebuah regulasi atau katakanlah ini kamahalan ya output secara langsungnya kita bisa melihat bagaimana kondisifitas secara objek pajak termasuk secara umumnya kan blom toto, ketika kemudian secara regulasi tidak ada kan paling nek pemerintah kan di-class action-kan dari aspek itu ketika terjadi, nah... selama ini kan kita belum menemui hal-hal seperti itu walaupun kalau bahasanya temen-temen dewan, ah.. itu kan entuk iki kan melalui sendiri, tidak berani mengambil resiko, yang kemudian ya.. tapi apa boleh buat ya.. memang itulah yang kita lakukan, jadi artinya secara langsung ketika temen-temen datang mendapatkan ilmu, kemudian bisa menjadi transfer learning, menjadi motivator, kemudian secara regulasi yang ada, kemudian bisa tidak ada yang dikecewakan kemudian bisa menerima dengan baik tanpa harus, nah.. itu yang selama ini yang secara langsung dirasakan ya seperti itu</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|-----------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| 8 : Drs. Nur Hadiyanto, M.Acc. | | <p>Emerha e.. saya ingin yang e.. mendalami yang kemaren pak, budaya apa itu budaya kerja ya? Nur Hadiyanto Ya.. Emerha e.. kalo untuk ini pak e.. apa namanya di bidang bapak yang.. itu pertama kali belajar untuk e.. mensistemkan semua itu dari mana pak? Nur Hadiyanto o.. nggeh mensistemkan semua, e.. ketika awal-awal SIMDA nggeh? Emerha Awal-awal SIMDA.. Nur Hadiyanto Mbak Sri, nek dulu awal-awal SIMDA itu seng mulai dari mana dulu, anggaran dulu terus mengalir ke Perbend gitu nggeh? Bu sri Nggeh, dari anggaran dulu Nur Hadiyanto Iya.. jadi dulu awalnya SIMDA versi pertama itu hanya ketoke nyusun RKA Bu sri Menyusun semua nggeh, tapi maksudnya sudah satu.. satu paket itu sudah dari anggaran ke pelaporan sudah pake SIMDA semua, mboten nganu.. tidak nyucil ngoten langsung pake, semuanya langsung dilatih pelaporan dilatih, pendengaran di latih, pelaporan dilatih Nur Hadiyanto Dilatih, tahun piro itu mbak Bu sri 2011 Nur Hadiyanto 2011 nggeh Bu sri Maksude le.. nopo.. le.. mulai.... Nur Hadiyanto Mulai menggunakan aplikasi SIMDA 2011 Emerha Itu latar belakang harus menggunakan</p> | <p>Nggih tentu selalu digunakan. Kalau apa, biasanya kan terutama di Bappeda. Jadi hasil-hasil penelitian setelah izin penelitian itu diberikan, kemudian ee ketika selesai kan dia wajib menyampaikan satu eksemplar nggih dikembalikan ke kita itu. Nggih beberapa digunakan sebagai bahan itu.</p> <p>Saya pernah yang, nggih kalau nanti dikembalikan dan ada rekomendasi yang harus kita lakukan biasanya digunakan. Yang pernah saya ikuti itu penelitian tentang ini, PAD dua kali. Jadi dia sih sederhana saja hanya analisis elastisitas PAD.</p> <p>Iya. Mana-mana yang sektor-sektor PAD yang masih bisa digenjot, mana yang sudah jenuh katakanlah dengan apa itu, dia masih kontribusi besar tapi pertumbuhan dengan apa dari,</p> <p>Iya diagram pertumbuhan. Ini kesininya pertumbuhan, ini kesininya kontribusi. Nah, itu to. Ya itu dulu pernah di. Ya walaupun mungkin yang lain-lain ndak tau ya. Artinya 100 penelitian digunakan, seratus-seratusnya atau serratus penelitian digunakan satu ya saya agak kurang, tapi yang pernah saya ikuti kalau ada rekomendasi dari penelitian yang memang penting dan bermanfaat pasti digunakan sebagai paling nggak bahan untuk merumuskan kebijakan.</p> <p>Oh, penelitian-penelitian luar. Ee biasanya itu menjadi salah satu, iya dipake juga sih sebagai salah satu konsideran. Biasanya misalnya merumuskan Renstra dan sebagainya, itu kan kita nek bahasa ekonomi itu perlu mempertimbangkan rata-rata industry. Katakanlah sebagai pembanding to misalnya tingkat ketergantungan terhadap Pusat atau derajat apa istilahnya disentralisasi seperti apa itu kan kita selalu membandingkan diri dengan luar gitu. terutama dengan ini, terutama dengan empat Kabupaten dan satu Kota yang sewilayah DIY. Nah, kita itu selalu membandingkan diri</p> | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>SIMDA itu kenapa pak, dulu kan manual ya sebelum itu? Nur Hadiyanto Ya.. dulu sebelum itu manual Bu sri Dulu pake e.. Nur Hadiyanto Apa namanya dulu..? Bu sri SIPK... Nur Hadiyanto SIPK dari Kemendagri, kemudian pindah ke SIMDA yang dari BPKP, ya.. saya kira ya.. sama lah kalo motivasinya menggunakan aplikasi sistem itu kan mempermudah pekerja, mungkin juga apa.. e.. semuanya menjadi tercatat gitu ya, pencatatannya jadi lebih teliti, cermat Emerha Kalo sekarang, waktu di masanya bapak selama SIMDA jalan itu apa ada tenaga ahli digunakan? Nur Hadiyanto Hem... tenaga ahli hanya dari ini, jadi di.. kami.. itu kan ada yang ditugaskan sebagai Admin SIMDA itu mas Mondri yang di... dia yang dilatih untuk menjadi Admin sehingga e.. pengetahuannya mungkin lebih dari temen-temen yang dilatih sebagai operator Emerha Berarti dia yang sering dikirim ke sana Nur Hadiyanto Iya.. kalo ada apa-apa ke BPKP ke.. ini itu mas Mondri yang.. Emerha Kalo BPKP yang datang ke sini ada juga untuk pelatihan? Nur Hadiyanto Sekarang jarang, sekarang jarang nggeh, kita yang ke sana kalo ada sesuatu pasti kita yang ke sana, jarang nggeh mbak BPKP ke sini? Bu sri Jarang Nur Hadiyanto Jarang... Bu sri Kalo update kan Cuma via...</p> | <p>dengan Bantul, Sleman, Gunung Kidul. APBD kita tahun ini berapa, oh ternyata Bantul, Sleman, Gunung Kidul sekian. Biasanya dari hasil penelitian orang-orang terhadap Kota, Sleman, Bantul, Gunung Kidul. Jadi kita gunakan. Terutama BPS ya lembaga luar</p> <p>Nggih. Kalau di Kulon Progo boleh saya katakan empat, kalau di sistem perencanaan pembangunan nasional itu ada empat pendekatan ya. Pendekatan teknokratik, partisipatif, kemudian pendekatan politik atau perwakilan lewat dewan, yang satu itu apa, ini masalah Musrenbang dan sebagainya. Saya kira kalau diukur derajatnya itu, sisi teknokratiknya itu cukup lumayan mewarnai perencanaan pada umumnya. Jadi tidak semata-mata politis asal usulane dewan terus bisa terwujud itu ya nggak. Ada porsi-porsi memang ee nope, usulan-usulan dari dewan. Tapi lebih ke teknokratiknya itu kental misalnya Bupati menghendaki sekarang misalnya apa ee postur APBBDLah katakanlah. Tahun ini APBD kita berapa, 1, 5 T nanti berapa persen ini untuk infrastruktur, berapa persen itu udah arahan dari berapa persen untuk pengembangan sektor pariwisata. Kemudian yang untuk bantuan sosial berapa itu ada arahan untuk seperti itu. Jadi porsi-porsi itu sudah secara garis besar ditentukan dulu porsi APBDnya nanti ya terjemahannya kita berebut kuenya sudah sesuai porsinya itu.</p> <p>Iya. Jadi nggih. Dulu kayaknya ada kok penelitian bluegreen ekonomi (06:59). Tapi tahun berapa ya saya dulu pernah jadi tim di Bappeda. Kita melihatnya persektor kontribusi PDRB bidang-bidangnya itu. Jadi bidang perdagangan berapa, bidang pertanian berapa. Nah, ini diukur dengan tadi itu, sama apa istilahnya ini jendela Jauhari Window ya. Hehe. Ini yang kontribusinya berapa, ini pertumbuhannya berapa. Kalau yang bagus kan kontribusi besar pertumbuhan besar itu yang digenjut. Nah strateginya kan itu. Jadi</p> | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|---|--|--------------------------------------|
| | | <p>Nur Hadiyanto Email apa internet gitu.. dikirim ininya nanti.. Emerha Itu setiap... setiap ada perubahan SIMDA itu selalu dipanggil ya.. update sistem? Nur Hadiyanto e... nggeh selalu diberitahu, ini saya sambu ini ya..., hehehehehe (narasumber tertawa) Emerha Okey pak, nggak apa-apa, Nur Hadiyanto Nggeh nek SIMDA kan ya... hampir sama dengan daerah lain yang menggunakan SIMDA nggeh Emerha Itu kenapa beralih ke SIMDA, nggak pake SIPKD yang..? Nur Hadiyanto SIPKD.. yang dari Kementerian dalam Negeri, nggeh waktu itu, ya.. mungkin kita memandang yang dari.. BPKP ini yang.. lebih.. apa ya.. terstandarlah.. ya.. Bu sri Dinas dulu kan masih, Kemendagri BPKD itu terus Pemda yang juga Kemendagri 12 udah nggak.. di kasih kayaknya alasannya itu soalnya dari.. awalnya.. Nur Hadiyanto Permendagri 13.. Emerha SI... kemaren itu gratis juga yang dari Kemendagri? Bu sri Itu.. begitu apa.. ganti Permendagri itu terus.. Nur Hadiyanto Ganti SIMDA, nek SIPKD gratis nggeh dari kemendagri nggeh Bu sri Sama gratis Emerha Selain.. pak siapa tadi itu yang dikirim, memang semua beliau di dalam..? Nur Hadiyanto Pak Mondy kemudian, pejabat struktural tuh malah rung tahi dilatih SIMDA e.. kita itu malah nggak tahu, hehehehe (narasumber tertawa)</p> | <p>kalau dia pertumbuhannya tinggi tapi kontribusinya kecil, nah strateginya mungkin nah itu nanti dia butuh alokasi APBD yang berapa sih untuk me-maintenance pertumbuhan. Semacam itu. Kita juga anu kok dulu, tenaga ahli, ada Pak siapa yang dari PSEKP itu.</p> | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Bu sri Nggak tahu, tapi saya juga orang lama juga nggak.. Nur Hadiyanto Iya.. yang struktural malah ndak, teknis ya.. Emerha Yang teknis ya.. Nur Hadiyanto Kita ya.. belajarnya otodidak aja buka-buka liat-liat laporan Emerha Jadi ketika dia sudah diajarin, nanti dia saja yangngurus semua ya? Nur Hadiyanto Ya.. yang ngajarkan ke semua, para bendahara operatonya kalo ada sesuatu ya sama Mas Mondi itu contohnya trouble, nggak konek atau ada masalah apa gitu.. Mas Mondi. Tapi.. kita itu makin mantep pake SIMDA itu karena ada fatwa siapa ya.. kemaren itu.., bahwa SIMDA ini yang diakui dan.. ya.. standar Nasional gitu ya, heheheheh (narasumber tertawa) Emerha Itu siapa itu, emang udah di.. Nur Hadiyanto Udah.. pake SIMDA saja pak, kalo di DIY ini kan seng nganggo SIMDA itu Bantul, Sleman Bu sri Sleman dereng.. Nur Hadiyanto Oh.. Sleman masih PKD nggeh.. Bu sri Buatan sendiri Nur Hadiyanto Oh buatan sendiri Emerha Buatan sendiri Nur Hadiyanto Bantul saja? Bu sri Bantul kaleh.. Kulonprogo Nur Hadiyanto Kota dan Gunung Kidul Bu sri Belum pak...</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>Nur Hadiyanto Iseh PKD nggeh? Bu sri Malah.. seng.. Provinsi malah.. sebelum.. Nur Hadiyanto Sistem yang lebih.. Bu sri Neng karang njuk di.. ini sendiri modif sendiri di sel.. Nur Hadiyanto Di kembangkan sendiri, di upgrade sendiri Bu sri Di kembangkan sendiri... Q.2. Model eksternalisasi Emerha Yang rekomendasikan pake SIMDA itu siapa dari itu.. Nur Hadiyanto Kalo yang merekomendasikan awal dari siapa ya.. ya.. hanya ini saja sih kayaknya, waktu itu PDKT BPKP aja ke kita, hehehe (narasumber tertawa) kayaknya Emerha Oh... BP.. BPKP yang tawarin kah? Nur Hadiyanto Iya.. BPKP yang menawarkan, waktu itu memang ini to.. situasinya BPKP itu kan mau dibubarkan gitu karena duplikasi, nah.. mereka harus mencari posisi sebagai pembina gitu kan akhirnya termasuk produk SIMDA ini dari BPKP itu kan, mereposisi BPKP Emerha Mereposisi tawarnya kuat Nur Hadiyanto Iya.. iya.. tidak biar tidak pengawasan tapi pembinaan Emerha Pembinaan.. Nur Hadiyanto Sampe... seng nggowo buah naga ke Kulonprogo itu yang wong BPKP nuk..heheheehhe, nggeh kulo kelingan Emerha Itu biasanya model, kalo dia dipanggil untuk pelatihannya di sana itu gimana tatap muka, atau BIMTEK gimana? Nur Hadiyanto</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Ya.. kalo yang BIMTEK, tatap muka BIMTEK Emerha Setelah dia sampe ke sini lagi, itu otodidak aja? Nur Hadiyanto Ya.. kalo anu ya.. nanti kan ada ini.. kegiatan perbendaharaan di kami itu... selalu di update di refresh apa.. e.. pengetahuannya para bendahara ini, kadang-kadang ada fitur baru yang.. kecil aja misalnya kemaren ketika muncul ini SP2D-SP2D dulu di SIMDA nggak ada terus kita komunikasi pak.. ini untuk pengelolaan anggaran-anggaran di luar kas daerah, di luar RKUD itu harus ada mekanisme pengesahan yang terutama untuk BLUD, nah.. ini kemudian di update ya.. kita ini lagi, kemudian fitur apa lagi pajak misalnya di update lagi ya.. kita sosialisasi lagi Emerha Itu sosialisasinya apa, di kumpulkan mereka atau gimana pak? Nur Hadiyanto Iya, nggeh.. kita kumpulkan cara bendahara ya narasumbernya mas Mondy itu Emerha Oh.. itu tiap berapa bulan pak? Nur Hadiyanto Itu.. tri.. tri wulan iya.., tri wulan tapi kayaknya.. 2019 ini turun ya anggarannya jadi kayaknya 4 bulan sekali jadi, per catur wulan, hehehehe (narasumber tertawa), iya dulu setahun 4 kali jadi 3 kali Emerha Kalo bimteknya itu selain bimtek BPKP ada juga? Nur Hadiyanto Maksudnya? Emerha Yang pelatihan untuk.. selain SIMDA? Nur Hadiyanto Kalo SIMDA ya.. BPKP Emerha Selain SIMDA, selain SIMDA Nur Hadiyanto Oh.. nek selain SIMDA yo... banyak materi</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>tapi yang paling sering ini perpajakan, perpajakan teknis-teknis, ya kalo ada baru sih kadang-kadang kita juga dari Provinsi Emerha Dari Provinsi ya.. Nur Hadiyanto Iya dari Provinsi, seperti kemaren non tunai itu kan ribut-ribut sak Indonesia gitu, ya kita undang Provinsi ini supaya memberi wawasan tentang non-tunai Emerha Sekarang sudah menggunakan itu ya.. C.. CSE.. CSM ya.. untuk pencairan? Nur Hadiyanto Oh.. ya.. CMS.. management sistem ya sudah cuman.. CMS nya masih versi yang paling sederhana hanya yang kalo rekening tujuannya itu BPD juga kalo yang di luar belum bisa Emerha Itu.. itu punya siapa CMS itu..? Nur Hadiyanto Ya punya BPD, CMS itukan milik Banknya, CMS kan ibaratnya hanya alat pembayaran saja to, tapi kalo mekanis-mekanisme anggaran dan sebagainya masih pake SIMDA, lha.. memang harapannya ke depan CMS itu bisa integrasi sama SIMDA Emerha Bis</p> | | |
| <p>11 : Iswandari Artiningsih, S.E.</p> | <p>Iswandari Artiningsih E, gak sih. Kalau kita itu yang kita lakukan standarnya ya aturan pusat. Iswandari Artiningsih Pusat seperti apa, amanahnya yang dalam peraturan disebut seperti apa itu yang kita terapkan. Itu aja.</p> | | | |
| <p>12 : Kuni Mas'adah</p> | | <p>e.. kebetulan terkait dengan pelaksanaan non tunai ini pernah kita pernah ada yang ikut magang di Pusat yaitu di bidang perbendaharaan, mereka yang ikut magang ke sana sedangkan yang harus melaksanakan adalah kita di e.. pengelola keuangan, ya kita tanya perlakuannya itu kepada mereka</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|-------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| | | <p>Ya.. kalo ada e.. aturan-aturan baru yang harus menyesuaikan, kalo ada aturan-aturan baru, kemudian e.. begitu ada aturan baru e.. ada yang usul, e.. ini aturan saya baru saya harus.., aturan mereka harus disesuaikan kalo toh mereka belum tahu kan mereka langsung akan melihat aturan baru untuk menyesuaikan aturan-aturannya</p> <p>Jarang, karena hasilnya kami e.. katakanlah kami diskusi oh.. hasilnya A, begitu hasilnya A, kita tanyakan kepada atasan secara beknizem, oh ya.. memang sebaiknya seperti itu, tapi kalo atasan e.. oh tidak sebenarnya e.. alurnya itu gini gini gini, kita akan diberikan penjelasan. Nah.. penjelasan seperti itulah yang nanti akan kita terapkan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan itu. Jadi kami jarang mendokumentasikan e.. diskusi-diskusi yang sifatnya hanya spontanitas</p> <p>Tidak-tidak-tidak-tidak, oh kami ada masalah katakanlah masalah seperti ini ini ini, diskusi temen-temen seperti ini bagaimana, oh.. sebenarnya memang seperti itu, atau oh.. tidak harusnya ini-ini-ini, kalo seperti itu kami langsung sampaikan ke temen-temen, kami laksanakan seperti apa, hasil arahan itu atasan..</p> | | |
| 13 : Lukman Hakim, S.E., M.M. | <p>Di Temanggung pada tanggal sebelum puasa itu 12 Mei itu. Tanya-tanya tentang yo sana. Misalnya saya peroleh sana itu pajak mineral bukan logam dan batuan itu tidak ditarik.</p> <p>Ya itu suatu ketika bisa dijadikan referensi misalnya Kulon Progo bisa aja punya kebijakan seperti Temanggung yang eksplorasi MBLB nya dihentikan ata dikurangi bisa.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p> | <p>Ha itu kan hasilnya itu yang anu, yang ee apa istilahnya membuat kebijakan kita pendataan di lapangan itu memakai sistem tol pendapatan, tol pendataan. Itu hasil dari sosialisasi itu.</p> <p>Pendataan truk yang lewat itu ditanya pakai itu (36:50), diberikan itu, suruh ngisi formulir dari PT apa gitu. Nanti di situ dipegang kita, hasilnya itu surat pemberitaan pajak daerah. Itu seperti itu. itu baru juga, itu strategi baru mulai bulan September 2017 baru dilaksanakan.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup.</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| | <p>Sistem informasinya kalau pengembangan nggak ada.</p> <p>Nggak. Karena di sini itu hanya koordinator saja, teknisnya di bidang pajak. Soalnya bidang pajak itu sekarang sedang mengembangkan Simda dari BPKP itu. seadanya gitu.</p> <p>Ha'a. itu adanya di bidang pajak.</p> <p>Di luar itu kita pernah tanya di Tangsel Tangerang Selatan terkait pemeriksaan pajak. Tapi saat ini kita mau nyusun anu Perbup. Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p> | <p>Maksudnya dari situ kita tahu daerah-daerah mana yang melakukan pemeriksaan kita niru gitu, mau meniru.</p> <p>Ha'a. Mau mulai target akhir tahunlah peraturan Bupati itu sudah jadi. Nanti biar digunakan untuk 2019 jika diperlukan sebagai dasar regulasi untuk pemeriksaan itu, pegangan pedoman. Pemeriksaan kan harus ada Perbup to. Standar pemeriksaan itu apa, terus syarat-syaratnya itu kan di Perbup itu sebagai pegangan kita untuk melakukan, untuk melangkah gitu lo.</p> | | |
| 14 : Meylani Lestari | <p>Iya.. misalnya toko ATK di.. idealnya sih.. membagi wilayah, daerah yang rame, daerah yang.. kan kita kan 12 kecamatan</p> <p>Makanya... nanti keputusannya mau pilih harga rata-rata kah atau harag tertinggi kah</p> <p>He'e, jadi kalo bapak jadi tokonya itu.. kami.. minta tolong gitu untuk menjadi responden kan ada uang jasa untuk pengisian blanko, karena data yang kita minta memang sangat banyak, bahkan nggak nggak sekali jadi nanti kadang-kadang kita balikin.. balik lagi ke tempat itu udah selesai apa belum, kalo cuman sedikit kita langsung tanya jawab aja</p> <p>Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu</p> <p>He'e.. , dan setiap kalo ada perubahan, kalo</p> | <p>Jadi mengikuti aturan Pusatnya ya pak ya, ada yang aturan Pusat yang sudah ada yang berubah, kita juga belum mengikuti juga ada, hibah. He'e.. hibah wasis kan sudah ada yang keluar yang terbaru 2018 perubahannya</p> <p>Jadi DPRD punya hak adminitratif itu to, kita baru e.. nyusun itu dua perubahannya sama Perbup SHBJ yang untuk 2019</p> <p>SHBJ, Standar Harga.. e.. Standarisasi Harga Barang dan jasa untuk digunakan 2019 gitu satu perbup, SHBJ, sama dua.. dua.. perubahan</p> <p>Oh ya... untuk penyusunan SHBJ ini kebetulan kan kami terlibatnya yang awal jadi misalkan cerita pertama sekali yang dilakukan adalah survei harganya dulu, supaya harga itu untuk tahun 2019 di surveinya di 2017 tapi akhir bahkan di tahun 2018 nya kita survei ulang. Udah.. kita udah dapet survei harga.. harga semuanya ya.. semua barang dan jasa yang digunakan oleh Pemda kita survei, timnya itu tim wakil dari OPD gitu</p> <p>Perbup yang lama udah tuh ya..., kita susulin Perbup yang baru, dengan item yang dirubah</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|--|---|--------------------------------------|
| | <p>ada kenaikan..</p> <p>Karena kalo Cuma sekedar di upload kan belum tentu yang mau pake, oh.. udah ada aturan baru kok nggak tahu gitu, jadi produk yang udah jadi..</p> <p>Iya..., kalo nggak ada di sini ya.. salinannya kita di kasihkan, karena kita yang mengusulkan Perda atau Perbup itu nanti sama bagian hukum kita diberikan salinan gitu, jadi mau ngopy ke kita bisa, ngopy langsung ke bagian hukum juga bisa, download juga bisa</p> | <p>apa aja udah itu tok yang..</p> <p>Kita baru pembahasan 3 kali, belum jadi, masih proses pembahasan di Bab belanja, pembahasan kita sedikit demi sedikit, ini bahas ini dulu, ini dulu, ini dulu selesai finalisasi setuju nggak dengan..</p> <p>Kemaren itu pelaksanaannya memang baru dalam bentuk instruksi Bupati, itu menindak lanjuti dari SK Mendagri terkait transaksi non tunai ini, untuk tahun ini, ini akan di apa namanya e.. regulasinya akan dituangkan dalam Perbup</p> <p>Perbup, sudah ada induk sebetulnya, induk nomer 1 tahun 2017 ya pak, tentang pelaksanaan transaksi non tunai. Masih secara umum</p> <p>e.. nggak ada, e.. itukan itu kalo udah jadi produknya Perbup atau pun Perda itu udah jadi output nya bagian hukum</p> <p>E.. bagian Kabupaten terutama OPD nya bagian hukum, kalo dari kami keluaran kami adalah draft atau wel.. Raperbup gitu kalo udah ranahnya mempublikasikan produk hukum udah di bagian hukum jadi tidak double publikasi ya pak</p> <p>Tidak kalo kami itu bener-bener mengolah secara substansinya.. kalo bagian hukum proses legal draftingnya saja, sudah jadi di dalamnya itu sudah tidak ada.. apa pak, maksudnya apa yang harus di buat itu sudah selesai. Sana itu tinggal pengesahan, pengundangan.. gitu ya pak ya.. sama proses penyusunan proses apa ya pak ya.. ya pembuatan perdana itu. Semua pembahasannya di kita, bagian hukum dilibatkan ketika penyusunan, mereka mengikuti dan memberikan sumbang saran kayak gitu, tapi proses dari kita, yang rapat kita, yang bahas kita, semua kita, draft udah jadi bagian hukum, kita minta tolong untuk diterbitkan tapi melalui pak Sekda atau Pak</p> | | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | <p>Bupati gitu</p> <p>Kalo Perbup baru dua itupun perubahan.. perubahan Perbup tentang.. saya ndak apal ya.. tentang ini e.. apa namanya hak administrasi, administratif DPRD</p> <p>He' e.. tetapi hanya satu personil atau ada yang 3 personil seperti itu, mereka kita bagi-bagi tugas gitu. Kaitan dengan harga konstruksi kita minta orang PU, kaitan dengan harga alat-alat kesehatan itu kita minta orang Dinkes gitu pak, pembagian sesuai dengan Tupoksi nya, kalo alat tulis kan itu, cenderung general kan semua menggunakan di kita ya.. kita.. ya pak ya.. yang lakukan pokoknya survei dulu. Udah survei dapat data harga kita memutuskan data harag yang dipakai mau harga rata-rata atau harga yang tertinggi dan berapa margin yang akan digunakan, karena nyusunnya sekarang makeknya besok gitu, udah.. kira rapat dapet harga kita rapatkan dan pembahasannya langsung ke TAPD seperti itu. Udah rapat ke TAPD masih ada item-item apa yang nggak disetujui ya nanti kita perbaiki lagi ada harga yang dinilai belum apa ya.. nggak mengikuti e.. harga sekarang ya kita survei ulang gitu. Udah rapat beberapa kali ada tanggapan ya.. kita perbaiki selesai, sudah kita proses bagian hukum, bagian hukum tinggal memproses Perdanya e.. Perbup nya...</p> <p>Jadi barang-barang apa yang mau kita masukan di draft itu kita cantumkan di sana nanti tinggal harganya yang mengisi yang pihak ketiga yang kita survei gitu, nah.. kita biasanya menggunakan 3 data ada pasar pak... ada 3 pasar</p> | | |
| 15 : Nasip, S.E. | <p>He'em. Jad kan katakanlah sekarang ada wajib pajak datang ke sini, katakanlah mau ee berkaitan dengan pajak ee restoran. Pertama mereka kan melaporkan, melaporkan jadi dengan surat pemberitahuan pajak daerah. Nah, terus nanti kan masuk di aplikasi bidang penetapan. Penetapan kan mengentry data</p> | | <p>Kalau berkaitan dengan yang luar itu biasanya kita berkaitan dengan masalah ee aturan. Katakanlah kita kalau mau menyusun Perbup itu biasanya kita adopsi, kita melakukan studi referensi.</p> | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
| | <p>yang mereka laporkan. Dari aplikasi itu bisa otomatis diterbitkan surat ketetapan pajaknya. Nah, itu nanti kan langsung bisa diprint dari data yang sudah dimasukkan tadi, nanti bisa disampaikan ke BP. Nanti dari BP itu kan ee menerima ketetapan, kalau sudah bayar nanti bidang bendahara itu memasukkan ke aplikasi. Nah, nanti bagi yang di subbid penerimaan itu nanti buka, oh ini sudah bayar. Otomatis sudah bisa ditampilkan. Tetapi sudah sampai jatuh tempo di subbid penerimaan ternyata masih kosong berarti kan mereka belum bayar. Lah, kemudian di subbid penagihan juga buka yang adminnya penagihan itu buka, oh ternyata yang sudah jatuh tempo dan belum bayar itu ini ini ini. Nanti terus diproses dari aplikasi itu sudah bisa muncul ee surat ketetapan pajak kurang bayar.</p> | | | |
| <p>18 : Taufik Amrullah, S.T., M.M.</p> | <p>Itu. Jadi bermula dari sana. Jadi ide itu saya punya buku ya sebentar, ada filenya nanti bisa dicopy. Mungkin dari buku itu njenengan bisa anu. Sebentar. Mungkin bisa dipakai. Diary. Nah mungkin ini bisa dipakai nanti. Karena membaca dari sini nanti. Iya. Nanti di copy aja.</p> <p>Heém. Ya intinya semacam ini, intinya saya ingin menyampaikan bahwa aset itu sebenarnya gak susah gitu. Cuma permasalahannya kita kan melupakan melupakan bahwa kita kan harus istiqomah didalam melaksanakan penatausahaan aset. Terlebih-lebih kalau untuk persediaan ya. Persediaan, faktur data, barang yang ada ya dicatat. Kemudian apa namanya transaksi ke luar ya langsung dilakukan pengeluaran. Sehingga pada akhir periodik mau pemeriksaan kita apa namanya tidak sudah kan gitu. Selama ini kan kendalanya kan dana itu juga masih ada yang ngerjakan model kebut semalam itu. Masih banyak semacam itu. Tapi sebenarnya kalau itu ditata dan ini terlebih-lebih yang untuk obat ya. Kalau obat kita sudah sampaikan ke teman-teman ya satu hari buat laporan ya hari itu juga selesai. Sehingga untuk yang SIM yang obat kan di</p> | <p>Iya. Iya kita ada buat buat Protap, buat prosedur, buat apa namanya aturan-aturan yang kita apa namanya ya semacam itu anunya. Tetapi yang terpenting kan bagi saya kan gini semua yang ada itu kalau bisa kan dituliskan. Jadi kalau kita gak punya aturannya ya kita buat aturannya. Itu kalau kita ya buat seperti ini.</p> <p>Dan goalnya akhirnya kita masukkan semua itu ada dalam rencana kita Bappeda.</p> <p>Iya. Tapi itu . . . (24:15) kita masukkan di Renstra.</p> <p>Ada. Training dari Pemerintah pusat kita kita apa namanya, kita ikutkan jadi apa namanya untuk hal-hal yang sifatnya ee sifatnya ada tambahan-rambahan aturan baru dan sebagainya itu kita anu. Itu kebanyakan udah sharing ke tempat-tempat.</p> <p>Hem.. untuk Perda sudah ada, Perda pengelolaan daerah yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan Perbup nya, perbup otonomi daerah, terus ada Perbup tentang sewa-menyewa barang milik daerah, sewa kemudian Perbup barang bongkarang, dari</p> | <p>Makanya waktu itu kan saya terus kemudian e.. apa e.. ngumpulkan materi, materi hasil pemeriksaan Nyonya itu kan e.. berkenaan dengan temuan-temuan aset dan jadilah buku “Meraih Opini WTP Apa Adanya” yang.. yang dikarang oleh ahli vidia, kalo bisa googling itu meraih buku apa, meraih opini WTP apa adanya ahli vidia, inilah yang kita pakai sebagai bahan pembelajaran di PSEKP</p> <p>Jadi itu.. saya kan dulu BPK, kemudian materi-materi dia saya kumpulkan, kemudian apa namanya e.. di edit kemudian apa namanya kita jadikan buku diterbitkan oleh BPFE, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi ya itulah yang kita pake untuk selama itu, saya nggak ada bukunya pas habis, biasanya peserta minta memang itu</p> <p>Ada beberapa apa.. beberapa mahasiswa yang apa namanya e.. yang.. ada di S2 itu ada S1 pernah itu ada beberapa itu, ada bukunya ya saya serahkan ke.. BKAD to, semua sudah ada.. ada.. di sana, jadi yang seperti mas, jenengan ini, itu apa namanya minta waktu, minta diskusi kemudian mereka kirimkan hasil penelitiannya kan gitu. Ya.. intinya memang ya.. permasalahan aset itu.. menjadi</p> | |

| Nama | K1. Survei dan Klasifikasi Informasi Eksternal | K2. Pengembangan Aturan dan Kebijakan | K3. Pemanfaatan Buku dan Publikasi Hasil Penelitian | K4. Pembahasan APBD dan Perubahannya |
|------|--|--|---|--------------------------------------|
| | <p>luar SIM tadi ada kita membangun SIM baru namanya SIMO. Jadi sistem informasi manajemen obat. Jadi kita buat secara online untuk semua puskesmas dan farmasi. Sehingga obat yang keluar dari bidang farmasi sekian dari puskesmas mana saja itu bisa juga dilihat. Dan itu obatnya apa namanya teman-teman pengelola obat mereka kan mendapat resep dari dokter kemudian mereka ngetik. Nah, itu pada saat mereka ngetikkan e-ticket ambil obat untuk pasien itu otomatis mereka sudah membuat laporan. Laporan pengeluaran jadi mereka tidak perlu dua kali kerja. Selama ini kan ngurus di e-ticket pake tangan kemudian ngetik lagi, nanti ngetik lagi.</p> <p>Ya... jadi kita kan untuk untuk apa namanya.. oh yang anu.. yang untuk.. untuk aset kita, kita belum online, kita masih offline, jadi modelnya masih apa mereka setor flashdisk, tapi data base kita ada di server kita.. kita urus sendiri jadi..</p> <p>Jadi nanti hasil akhirnya kita uploadkan dalam bentuk pdf ke.. kita pdf kan, jadi yang kemaren yang apa namanya, salah satu untuk pen.. e.. apa e.. untuk transparansi keuangan adalah waktu me.. menampilkan data aset Pemerintah kabupaten Kulonprogo selain data anggaran</p> <p>Ya.. setiap tahun hasil RKPD, jadi setiap.. apa namanya setiap akhir tahun hasil RKPD e.. kita uploadkan untuk neraca akhir tahun</p> | <p>barang bongkaran gedung, kemudian Perbup tentang e.. tindak lanjut e.. peraturan Bupati, keputusan Bupati tindak lanjut dari sensus. Kemudian penilaian barang milik daerah nah kita tindak lanjut di situ</p> <p>Jadi ee diawal mungkin saya bisa cerita, oke nanti gambarnya bisa banyak bercerita dokumentasi. Nah kenapa saya dokumentasikan semacam ini karena saya juga kerja sama sama apa namanya di PSEKP saya harus berinteraksi dengan peserta-peserta latihan dari berbagai apa daerah kan gitu. Saya melaksanakan apa yang yang sekarang saya jalankan. Jadi itu nanti ee ya jadi kita ada satgas WTP waktu itu kemudian....</p> <p>Iya, jadi.. kan sana yang meminta dari PSEKP yang selalu membagi iya..</p> | <p>kendala utama kan mulai opini WTP, tapi kalo sekarang untuk BKAD sekarang kan dengan pencapaiannya hampir sudah sekitar 300.., kalo 2000, kalo RKPD 2016 itu sekitar 386 Kabupaten kota yang sudah WTP</p> | |